

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul skripsi ini adalah ” **SANKSI PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** “. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian judul yang dimaksud, maka perlu dijelaskan makna judul tersebut. Penggelapan pajak terdiri dari dua kata, yaitu Penggelapan dan Pajak.

1. Penggelapan pajak

- a. Penggelapan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 372 penggelapan memiliki arti “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

- b. Pajak

- 1) Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran umum.¹

- 2) Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

¹Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Refika Aditama 2004), h. 6.

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Jadi yang dimaksud penggelapan pajak adalah, suatu perbuatan dimana lembaga, badan atau perusahaan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Biasanya penggelapan pajak ini dilakukan untuk menekan atau mengurangi biaya konsumsi terhadap barang yang dikenakan pajak. Perusahaan melakukan penggelapan pajak dengan berbagai cara baik dengan melakukan pemalsuan dokumen tentang pengeluaran perusahaan, laba perusahaan untuk memperkecil biaya pajak yang dikenakan oleh negara kepada perusahaan.

2. Hukum positif itu sendiri memiliki arti hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada tempat dan waktu saat ini. Hukum ini disebut juga sebagai *ius constitutum*. Hukum positif di setiap negara akan selalu berbeda dengan hukum positif di negara lain karena yang dikatakan tergantung dari tempat dan waktu saat itu.²

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Atau dalam kata lain hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam.³

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini fokus bahasannya terletak pada menganalisis penggelapan pajak dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam.

²Abdoel Djamali. R, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.147.

³ Nurkholis, " Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia" (online) tersedia di : http://www.pajakdalam_pandangan_hukum_Islam.com, (23 juli 2016)

B. Alasan Memilih Judul

Dalam melakukan penelitian atau pembahasan suatu permasalahan, sudah barang tentu ada hal-hal yang menarik untuk dipecahkan dan dirumuskan. Adapun alasan penulis memilih judul **“SANKSI PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**. Sebagai judul penelitian ini adalah : penggelapan pajak merupakan suatu pokok permasalahan yang dirasa sangat perlu bagi penulis untuk mengetahui dan memahami konsep penggelapan pajak jika ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Disatu sisi kejahatan dalam dunia perpajakan merupakan permasalahan yang cukup mengancam bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Disisi lain kejahatan perpajakan pula dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat dalam suatu Negara Indonesia.

C. Latar Belakang Masalah.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, prosentasinya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban zakat bagi yang telah memenuhi syarat.⁴ Di sisi lain, sebagai warga negara indonesia, umat islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah di buat undang undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan diri kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi pajak merupakan suatu instrumen kepatuhan warga negara terhadap pemerintah.⁵ Cerminan tersebut dapat melekat terhadap seluruh lapisan

⁴ Nurkholis, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia ” (online) tersedia di : http://www.pajakdalam_pandangan_hukum_Islam.com, (23 juli 2016)

⁵Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, cet-10, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007).h. 1077.

masyarakat sebagai nilai kepatuhan diatas.Ia beranggapan kepatuhan integrasi pemerintah dapat dilihat dari kepedulian warga negaranya terhadap kebijakan perpajakan yang diatur.Namun demikian konstruk sosial suatu negara juga layak diperhatikan dalam aplikasi kebijakan pajak yang ditetapkan. Seperti Indonesia, misalnya, sebagi negara yang mayoritas muslim tentunya akan memiliki kecenderungan yang sedikit berbeda dari berbagai peraturan yang dibuat, khususnya dibidang perpajakan, karena dalam pemahaman mereka terdapat konstruk hukum Islam yang mengatur masalah distribusi harta selain pajak seperti zakat, infak, dan lain-lain.

Akan tetapi indonesia sendiri sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap upaya pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebuah program yang tentunya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyatnya dan negara tersebut, yang mana untuk memperoleh hal itu peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam bentuk merupakan sumbangsih yang sangat *urgen*, yang salah satunya adalah pajak.⁶

Begitu juga dengan intensitas hukum Islam yang secara utuh telah mengatur dan mengembangkan mekanisme perpajakan sejak dahulu kala, seperti pada masa daulah abbasiyah yang telah mengembangkan sistem perpajakan dengan baik seperti tercatat dalam sejarah Islam. Pajak merupakan sumber utama pemerintahan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Kegunaan uang pajak meliputi dari uang belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, serta kantor polisi di biayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang hasil dari pajak juga digunakan untuk pembiayan dalam rangka memberi

⁶Y. Sri Pudyatmoko, *pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) h.1.

rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara yang mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau layanan dari pemerintahan yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjukan jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak dapat imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.⁷

Upaya penagihan dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Entah itu melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan cara penyiasatan tertentu atau bahkan penyelundupan pajak.⁸

Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari keengganan seseorang untuk membayar pajaknya tersebut, maka akan timbul apa yang disebut dengan

⁷*Ibid*, h. 173.

⁸*Ibid*, h. 174.

penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa pelaku dan obyek transaksi pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap lembaga.⁹

Penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.¹⁰ Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Dalam kaitannya bahwa tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pencucian uang tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karenanya penempatan tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan langsung antara gejala kriminalitas dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu mempertimbangkan pula adanya fenomena bahwa kejahatan penggelapan pajak bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional maupun internasional (*transnasional*), sehingga sangat penting untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, sehingga salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna.

⁹Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, (Bandung: Books Trade Center, 2009), h. 14.

¹⁰*Ibid*, h. 14.

Transfer sumber daya ekonomis masyarakat kepada negara Pajak dapat dipungut dari aliran arus sumber daya ekonomis, dalam bentuk penerimaan penghasilan dan pengeluarannya dan persediaan sumber daya ekonomis dipungut dari orang pribadi, badan hukum dan subyek lainnya, serta dipungut langsung kepada si pembayar pajak dan tidak langsung melalui pihak lain sebagai pemungut pajak.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara sudah pasti pungutan pajak tersebut berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek kehidupan Negara. Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan *illegal* yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan berkurangnya penerimaan atau kekayaan negara.

Untuk menghindari pelacakan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan perpajakan biasanya pelaku melakukan tindakan pengalihan, menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh aparaturnya penegak hukum. Kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan biasa pula disebut "kejahatan kerah putih" (*white collar crime*) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan profesional.¹¹

¹¹J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Penerbit Eresco, 1994), h. 28.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kejahatan di bidang perpajakan tidak jarang dilakukan oleh oknum petugas pajak, atau dilakukan bersama-sama (*kolusi*) dengan orang-orang yang terkait dengan institusi perpajakan berselimut yuridis formil, baik sebagai pembantu, pelaku penyuruh maupun pelaku intelektualnya.

Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan di bidang perpajakan harus ditangani secara serius dan dengan cara-cara yang luar biasa pula mengingat hasil Kejahatan juga dibedakan dengan kejahatan lain pada umumnya, karena perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal sebagai “*white collar crime*”. Kedudukannya sebagai “*white collar crime*” inilah yang memberikannya perhatian khusus, baik dari kalangan akademisi ahli kriminologi dan ahli hukum pidana, maupun dari kalangan praktisi penegak hukum.

Kejahatan ini sangat material dalam konteks pendapatan negara, yang apabila dibiarkan begitu saja akan mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Di bidang perpajakan mengandung makna adanya hak dan kewajiban, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya pada pelaksanaannya melekat perilaku kepatuhan dan ketidakpatuhan. Untuk hal ini, ketidakpatuhan membayar pajak merujuk pada ketidakberhasilan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada institusi pajak guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, membayar dan melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan lengkap, baik karena alpa maupun sengaja. Ketidakpatuhan membayar pajak baik yang masih *legal* maupun *illegal* merupakan fenomena yang umum terjadi di hampir semua negara. Penghindaran dan penggelapan pajak masih dapat diperdebatkan, paling kurang terdapat indikasi seberapa besar ketidakpatuhan pajak yang terjadi dalam sistem perpajakan di beberapa negara.

Rendahnya realisasi potensi pajak dikarenakan kendala administrasi antara lain karena kesulitan:

1. Identifikasi dan pencarian lokasi pembayar pajak.

2. Kurangnya data dan informasi pajak untuk menentukan kelengkapan dan kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan utang pajak, dan penagihan pajak kurang dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya ketidakpatuhan pajak secara meluas. Sedangkan dari sisi pembayar pajak, secara umum boleh dikatakan bahwa kurangnya pendidikan dan pengawasan pajak, merupakan beberapa penyebab ketidakpatuhan perpajakan.¹²

Kita ketahui bahwa kejahatan penggelapan pajak, pencucian uang dan korupsi merupakan rangkaian kejahatan yang saling terkait satu sama lain, namun dalam penanganannya tidak selalu sama. Misalnya untuk kasus penggelapan pajak, penyelesaiannya boleh di luar persidangan. UU KUP memberi peluang kepada pelaku penggelapan pajak bebas dari jeratan hukum pidana. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan.

Namun demikian, penghentian penyidikan pidana tersebut hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak beserta dendanya. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa kejahatan pajak juga terkait erat dengan praktik korupsi. Untuk mengetahui pola kejahatan korupsi dalam perpajakan dengan memperhatikan rutinitas, momen-momen dan makna-makna yang bersifat problematik dari kehidupan individu atau sekelompok individu dalam lingkungan perpajakan. sebagai berikut:

1. Korupsi internal, dilakukan oleh oknum aparat pajak dalam lingkup Ditjen Pajak itu sendiri.
2. Korupsi eksternal, dilakukan aparat pajak dalam berhubungan dengan wajib pajak.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Mengingat

¹² Nurkholis, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia” (online) tersedia di : <http://www.pajakdalam.pandangan.hukumIslam.com>, (23 juli 2016)

begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan harus dapat dicegah dan diberantas. Sejalan dengan itu, setiap pelaku kejahatan di bidang perpajakan harus dihukum dan hasil kejahatannya disita oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam pajak lebih dikenal dengan istilah (*Dharibah*) yaitu suatu pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara yang hingga saat ini mengalami perkembangan dengan berbagai jenis. Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau membolehkan dalam pungutan pajak, yang ada dan populer serta sering dikemukakan dalam pungutan pajak hanyalah dalil-dalil yang bersifat umum, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 177 yaitu:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa “¹³

Selain itu juga ada Qs. An-Nisaa (4): 59 tentang perintah taat kepada *ulu al-amr*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴

Tidak begitu jelasnya Islam dalam mengatur tentang sistem pemungutan pajak, bukan berarti Islam membebaskan pemeluknya untuk tidak membayar pajak, terlebih melakukan tindak penggelapan pajak. Penggelapan pajak dalam hukum

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Diponegoro,2005), h. 21

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Diponegoro,2005), h. 69

Islam dapat disebut dengan istilah *Ghulul*¹⁵ (penggelapan). Dalam hal ini yang dimaksud *ghulul* dalam hukum Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Rawas Qala'arji dan Hameed Sadiq Qunaybi ialah

" اخذ الشيء ودسه في متاعه "

Mengambil sesuatu dan menyembuyikannya dalam harta.¹⁶

Kaidah diatas memiliki arti bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu ialah mengambil barang yang bukan haknya kemudian menyembunyikannya dalam hartanya.

Dari pendapat kedua Ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari Qs. Ali-Imron (3): 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ

تُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.¹⁷

yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang dan berkhianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan

¹⁵Dr. Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah* edisi 1 (Jakarta, Balai Libang dan Departemen Agama RI. 2009) h.94.

¹⁶Muhammad Rawas Qala'arji dan Hameed Sadiq Qunaybi, *Mu'jamu Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut : Dar al-Nafis, 1985), h. 334.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Diponegoro, 2005), h. 56

khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan diatas dan untuk memecahkannya melalui penulisan skripsi yang berjudul, **PENGGELOPAN PAJAK DALAM PESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi penggelapan pajak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan tentang sanksi penggelapan pajak menurut hukum positif dan hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam masalah penggelapan pajak.
- b. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penggelapan pajak.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang tindak pidana penggelapan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait di bidang perpajakan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi dan meminta pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perpajakan.

- 2) Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan tindak pidana perpajakan agar dapat menjerat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak.

F . Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis tindak pidana perpajakan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum positif dan Hukum Islam mengenai penggelapan pajak, dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸

2. Metode pengolahan data

Sementara untuk pengolahan data dilakukan secara rinci untuk mencari persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua hukum tersebut. Oleh karenanya metode yang digunakan ialah metode induktif yaitu mengumpulkan seluruh data yang didapat yang kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan masalah

3. Metode analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu membedakan antara hukum positif dan hukum

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*,(Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), h.3.

Islam. Sedangkan untuk metode lapangannya adalah kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman dalam memahami setiap permasalahan.¹⁹

Setelah melakukan analisis data secara rinci maka akan ditemukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut, tidak hanya penjelasan seputar penggelapan pajak menurut hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga tentang sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Yang kemudian akan dilakukan analisis tentang kekuatan dan kelemahan antara kedua hukum dan hukum yang mana yang baik digunakan untuk di Indonesia.

¹⁹ *Ibid*, h. 5.